



Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



Good Governance Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris OPD Kabupaten Solok)

Nur Azlina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Indonesia

Informasi Artikel

Diterima : Februari 2019
Review Akhir : April 2019
Diterbitkan online : September 2020

Kata Kunci

Performance of Government Agencies, Regional Financial Management, Government Internal Control Systems, Good Governance.

Korespondensi

E-Mail nurazlina75@gmail.com

Abstract :

This study aims to examine and analyze the relationship of regional financial management and internal control systems of government with the performance of government agencies mediated by good governance. The dependent variable used is the performance of government agencies, the independent variable used is regional financial management and government internal control systems and one mediating variable in the form of good governance. The population in this study is the Solok District Organization of 26 OPDs. The sampling technique used in this study is saturated sampling with 76 respondents. This study uses primary data. Data collection techniques based on survey method by providing a set of questionnaires to respondents. Path analysis is used to test the hypothesis.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah dengan kinerja instansi pemerintah yang dimediasi oleh *good governance*. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja instansi pemerintah, variabel bebas yang digunakan adalah pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah dan satu variabel mediasi berupa tata kelola pemerintahan yang baik. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Kabupaten Solok sebanyak 26 OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dengan 76 responden. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data berdasarkan metode survei dengan memberikan seperangkat kuesioner kepada responden. Analisis jalur digunakan untuk menguji hipotesis.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut melaksanakan *good governance* sehingga dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dalam hal ini instansi pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi, Menurut Bastian (2013) kinerja instansi pemerintah daerah merupakan keseluruhan pencapaian hasil yang telah diraih dan dicapai pemerintah daerah dalam menangani keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu kinerja instansi dapat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah dan *good governance*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi. Hasil penelitian Hidayat (2015) mendukung hipotesis bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Bagaimanapun keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari penerapan *good governance*. Pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi *good governance*. Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah, antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah pusat dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Ruspina (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi pemerintah. Konsensus logis dari

tuntutan masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggungjawab dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja melalui suatu pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah. Namun, penerapannya belum berjalan efektif dan efisien karena masih adanya temuan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian yang dilakukan Amelia (2014) mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern mempengaruhi penerapan *good governance*. Hasil penelitian Edy (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Namun pada penelitian Ruspina (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap *good governance*.

Kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh *good governance*. Secara teori *good governance* melaksanakan pengelolaan pemerintahan dengan adanya *stakeholders* yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta juga ikut terlibat dalam mendayagunakan sumber daya yang meliputi alam dan manusia ataupun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. Pengembangan dan penerapan prinsip *good governance* yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tentu hal ini akan berdampak pada kinerja instansi pemerintah yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. dan apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka pemerintah dapat menjalankan kegiatan dan programnya dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah itu sendiri (Mulyawan, 2009 dalam Jayanti 2015). Hasil penelitian Jayanti (2015) mengemukakan bahwa *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan mengkaji kemampuan *good governance* dalam memediasi hubungan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan studi empiris pada OPD di Kabupaten Solok.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan kinerja instansi pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai seluruh capaian/hasil-hasil selama pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan dan perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pemerintah daerah.

Kinerja perlu diukur. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah diukur menggunakan indikator-indikator tertentu. Menurut Bastian (2013) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator untuk mengukur kinerja meliputi:

1. Indikator masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan.
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
5. Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat dan dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk tahun berikutnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan kebijakan- kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset pemerintah dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data. Setiap organisasi tak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Salah satu cara yang sedang diupayakan dalam meningkatkan kinerja di lembaga pemerintahan adalah dengan melakukan pengendalian intern.

Dalam lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Good Governance

Good Governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut

Peraturan Menteri PAN Nomor 13 Tahun 2009, *Good Governance* adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintahan, masyarakat dan swasta secara proposional sebagai tiga pilar utama. Konsep ini menunjukkan bahwa siapapun yang berperan dan apapun peran yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik.

United Nation Development Program (UNDP) dalam Ruspina (2013) mendefinisikan *Good Governances* sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain tercipta suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*State, Private, Society*). Namun dalam kenyataan, negara (*State*) masih menjadi yang paling dominan.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi.

Penelitian Hidayat (2015) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Haqiqi (2016) yang mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah juga semakin baik.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jika keuangan daerah dikelola dengan baik maka tujuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan pada gilirannya akan meningkatkan peningkatan kinerja pemerintah.

Berdasarkan argumentasi diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H₁: Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi

Menurut PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien yang berarti menyangkut dengan kinerja instansi pemerintah. Pengendalian intern bertujuan menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Tesmasmi (2013) kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi. Untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah perlu

diimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat diketahui dana public yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rosdiana, 2010)

Hasil Penelitian Yuda (2012) menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini didukung penelitian Amelia (2014) yang juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten pelalawan. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian Meriem (2014) yang membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kota Pasuruan.

Berdasarkan deskripsi diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap *Good Governance*

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh dengan cara menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Suatu instansi dapat dikatakan telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerahnya apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. (Arso, 2012)

Penelitian Ruspina (2013) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*. Penelitian Syafrion (2013) juga mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan menjadi dasar penilaian dan membuktikan bahwa penerapan *good governance* pada pemerintah daerah tersebut baik.

Sehingga dapat disimpulkan ketika suatu daerah telah menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangannya akan menghasilkan laporan keuangan yang handal. Jika keuangan suatu daerah telah dikelola dengan baik maka daerah tersebut telah akan telah menerapkan prinsip *good governance*. Dan sebaliknya apabila pengelola keuangan suatu daerah belum dikelola dengan baik maka daerah tersebut belum menerapkan *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap *Good Governance*

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap *Good Governance*

Menurut Rozalina dalam Wiratno (2010) jika pengendalian internal tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dilakukan dengan andal, pengamanan asset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan pada peraturan (Mardiasmo, 2009 : 208).

Jadi bisa dikatakan jika sistem pengendalian intern pemerintah tersebut terimplementasikan dengan baik, maka tata kelola pemerintah yang baik dapat tercapai, yang

ditandai tercapainya visi, misi, serta tujuan pemerintah daerah, akan memberikan efisien dan efektif dalam operasi, keandalan pelaporan keuangan, asset Negara tetap aman dan peraturan perundang undangan dijalankan dengan baik.

Penelitian Edy (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Penelitian Wahyudi (2009) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan *Good Governance* (GG). Begitu pula dengan penelitian Wirda (2012) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap *good corporate governance*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap *Good Governance*

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan melaksanakan *good governance* salah satu manfaat yang bisa diambil adalah meningkatnya kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi serta lebih meningkatkan pelayanan publik (Mulyawan, 2009 dalam Annisa, 2017). Dengan melaksanakan *good governance* yang baik, tentu kinerja suatu instansi pemerintah akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, diterapkannya *good governance* pada organisasi pemerintah, tentu kinerja instansi pemerintah akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila penerapan *good governance* dilakukan oleh organisasi maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Penelitian Jayanti (2015) mengemukakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Annisa (2017) mengemukakan hal yang sama, yaitu penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan *good governance* maka kinerja dari pemerintah daerah juga semakin baik.

Dapat disimpulkan, jika pemerintah daerah telah mampu menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya, ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah telah baik. Jika semakin baik penerapan *good governance* maka kinerja dari pemerintah daerah juga semakin baik. Dan sebaliknya, jika belum terapkannya *good governance* maka kinerja dari pemerintah daerah belum baik.

Berdasarkan deskripsi diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: *Good Governance* Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dimediasi *Good Governance*

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran, sehingga memberikan rasa tanggung jawab dan mendorong kreativitas kepala daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggung jawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat (Rohman, 2009 dalam Annisa, 2017).

Salah satu aspek dari pemerintahan yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Penerapan *good governance* bagi pemerintah merupakan hal yang selalu ditekankan sejak memasuki otonomi daerah.

Suatu instansi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip *Good Governance* apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance* (Arso, 2012). Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan jika keuangan daerah dikelola dengan menerapkan prinsip *good governance* maka akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan. Penerapan prinsip *good governance* yang baik pada pemerintah daerah mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di era otonomi daerah. Dan ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah meningkat.

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: *Good Governance* Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dimediasi *Good Governance*

Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas (Arens 2008). Sistem pengendalian intern dilakukan untuk menjaga agar aktivitas organisasi tetap mengarah kepada tujuan organisasi semula. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat mendorong manajer untuk membuat keputusan yang mengarah kepada tujuan organisasi. Adanya sistem pengendalian intern yang baik juga dapat mengatasi tingkat kecurangan (fraud) dari karyawan.

Sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Kelemahan kinerja suatu instansi pemerintah selama ini terjadi karena lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern (Kawedar, 2010). Oleh karena itu pemerintah menerbitkan panduan mengenai desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang berlaku di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui peraturan PP No. 60 tahun 2008. Hal ini diharapkan nantinya sistem pengendalian intern pemerintah mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada masyarakat.

Dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif dan efisien maka tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Efektif dan efisien disini adalah aktifitas pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat berupa kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia (Mardiasmo, 2010). Dengan dikeluarkannya PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance* (Marzan, 2010)

Penelitian Hariyati dan Oliviani (2013) bahwa *good corporate governance* mampu memediasi hubungan pengendalian intern terhadap kinerja.

Berdasarkan paparan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: *Good Governance* Memediasi Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dengan Kinerja Instansi Pemerintah

METODE PENELITIAN

Sumber Data, Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Solok. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *sensus sampling* sehingga jumlah sampel sebanyak 26 OPD dengan jumlah responden sebanyak 76 orang.

Pengukuran Variabel

Variabel kinerja instansi pemerintah diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Zalni (2013) yang terdiri dari 7 pernyataan. Variabel pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Zalni (2013) yang terdiri dari 10 pernyataan. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Lucky (2013) yang terdiri dari 10 pernyataan. Variabel *good government* diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Ruspina (2013) yang terdiri dari 12 pernyataan. Skala likert dengan 5 preferensi jawaban digunakan untuk keempat variabel penelitian.

Teknik Pengujian Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka dilakukan pengujian kualitas data dan pengujian asumsi klasik. Pengujian kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran umum mengenai deskripsi variabel penelitian. Hasil Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviatiaon
Kinerja Instansi Pemerintah	71	21	35	26,944	3,1300
Pengelolaan Keuangan Daerah	71	37	65	51,873	8,1590
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	71	24	48	39,479	5,1070
<i>Good Governance</i>	71	33	53	40,310	5,1230

Berdasarkan Tabel 1 diketahui variabel kinerja instansi pemerintah memperoleh nilai mean sebesar 26,944 dan standar deviasi sebesar 3,1300 dengan nilai maksimum 35 dan nilai minimum 21. Variabel pengelolaan keuangan daerah mempunyai nilai mean 51,873 dan standar deviasi sebesar 8,1590. Nilai maksimum jawaban responden sebesar 65 dan nilai minimum sebesar 37.

Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memperoleh nilai mean sebesar 39,479 dan standar deviasi sebesar 5,1070. Nilai maksimum jawaban responden sebesar 48 dan nilai minimum sebesar 24. Variabel *good governance* mempunyai nilai mean sebesar 40,310 dan standar deviasi sebesar 5,1230 dengan nilai maksimum jawaban responden sebesar 53 dan

nilai minimum sebesar 33.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas instrument dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan yang terdapat dalam instrument yang digunakan adalah valid. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas kuesioner menunjukkan bahwa instrument yang digunakan pada penelitian ini dapat diandalkan.

Pengujian Analisis Jalur

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis jalur yang merupakan pengembangan dari regresi linier berganda. Analisis jalur dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening dapat dihitung melalui suatu pengamatan analisis jalur. Di dalam analisis jalur ini dilakukan uji regresi terhadap 2 persamaan regresi. Hasil dari masing-masing persamaan regresi sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Persamaan 1

	Standardized Coefficients
	8,248
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,017
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,203
Good Governance	0,546

Dari tabel 2 maka hasil analisis regresi persamaan 1 dapat ditemukan sebagai berikut:

$$KIP = 8,248 + 0,017 PKD + 0,203SPIP + 0,546 GG + e$$

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Persamaan 2

	Standardized Coefficients
Constant	17,869
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,236
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,372

Dari tabel 3 maka hasil analisis regresi persamaan 2 dapat ditemukan sebagai berikut:

$$GG = 17,869 + 0,236 PKD + 0,372 SPIP + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada Table 4 berikut ini :

Tabel 4. Hasil Uji t Persamaan 1

Variabel Independen	T hitung	Sig.	Keputusan
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,017	0,865	H _{a1} Ditolak
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1,956	0,055	H _{a2} Ditolak
Good Governance	5,206	0,00	H _{a5} Diterima

Tabel 5. Hasil Uji t Persamaan 2

Variabel Independen	T hitung	Sig.	Keputusan
Pengelolaan Keuangan Daerah	2,129	0,037	H _{a3} Diterima
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,335	0,001	H _{a4} Diterima

Pengaruh	Koefisien Regresi	Keputusan
Pengaruh Langsung (PKD – KIP)	0,170	H _{a6} Diterima
Pengaruh Tidak Langsung (PKD – GG) x (GG –KIP)	0,203	

Pengaruh	Koefisien Regresi	Keputusan
Pengaruh Langsung (SPIP– KIP)	0,203	H _{a7} Diterima
Pengaruh Tidak Langsung (SPIP – GG) x (GG –KIP)	0,204	

Secara umum masing-masing variabel menunjukkan perbedaan dengan tingkat signifikan yang berbeda antara satu dengan yang lain.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai signifikansi $0,865 > 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak yang berarti pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Ditolaknya hipotesis ini artinya pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Kemungkinan ketidaksignifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah disebabkan ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu adanya kebijakan dari Kepala Daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak dikelola secara tertib, efektif, efisien dan juga kesulitan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah karena pemahaman pelaksana yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah belum tentu dapat menjamin bagus nya kinerja pemerintah suatu daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik tidak menjamin menciptakan laporan keuangan pemerintah yang baik pula, sehingga hal ini tidak dapat mengindikasikan kinerja yang baik dan ini akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka t hitung(1,956) < t tabel (1,997) dan nilai signifikansi $0,055 > 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a2}Ditolak yang berarti sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Ditolaknya hipotesis ini artinya sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Kemungkinan ketidaksignifikan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah disebabkan ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu adanya kebijakan dari Kepala Daerah sehingga sistem pengendalian intern pemerintah daerah tidak dijalankan secara tertib, efektif, efisien dan juga kesulitan teknis dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah karena pemahaman pelaksana yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah belum tentu dapat menjamin bagus nya kinerja pemerintah suatu daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang dikelola dengan baik tidak menjamin menciptakan laporan keuangan pemerintah yang baik pula, sehingga hal ini tidak dapat mengindikasikan kinerja yang baik dan ini akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap *Good Governance*

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh nilai signifikansi $0,037 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima yang berarti pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Dengan diterimanya hipotesis ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku akan menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang andal dan relevan. pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional. Apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip berkeadilan. Dimana, pembagian dana untuk alokasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan. Pelaporan keuangan daerah disajikan sesuai dengan prinsip transparansi. Dalam tahap pelaporan ini, organisasi sektor publik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Pelaporan keuangan daerah di sektor publik berupa laporan realisasi anggaran sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat umum. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran di sektor publik diawasi melalui kerangka aturan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance*. Sehingga disimpulkan apabila pengelolaan keuangan suatu daerah telah berjalan dengan baik maka akan terwujudlah *good governance* pada daerah tersebut.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap *Good Governance*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka t hitung $(3,355) > t_{tabel} (1,997)$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a4} Diterima yang berarti sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Hipotesis ini diterima membuktikan jika pengendalian internal tidak memadai maka

sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Pengendalian intern dapat membantu meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dilakukan dengan andal, pengamanan asset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan pada peraturan sehingga dapat terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap *good governance*. jadi bisa dikatakan jika sistem pengendalian intern pemerintah terimplementasikan dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat tercapai.

Good Governance Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka t hitung(5,209) > ttabel (1,997) dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a5} Diterima yang berarti *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis ini membuktikan bahwa *good governance* yang tercipta dalam menjalankan roda pemerintahan dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Dengan melaksanakan *good governance*, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkat kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan pelayanan kepada publik. Dapat disimpulkan, jika pemerintah daerah telah mampu menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya, ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah telah baik. Jika semakin baik penerapan *good governance* maka kinerja dari pemerintah daerah juga semakin baik.

Good Governance Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka pengaruh langsung (0,170) < Pengaruh tidak langsung (0,203) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a6} Diterima yang berarti *Good Governance* Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis ini membuktikan bahwa walaupun penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah telah baik, mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Awalnya variabel pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja instansi pemerintah, dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti *good governance* mampu memediasi hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja instansi pemerintah.

Suatu instansi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip *Good Governance* apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat

daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan jika keuangan daerah dikelola dengan menerapkan prinsip *good governance* maka akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan. Penerapan prinsip *good governance* yang baik pada pemerintah daerah mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di era otonomi daerah. Dan ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah meningkat.

Good Governance Memediasi Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka pengaruh langsung (0,203) > Pengaruh tidak langsung (0,204) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₇ Diterima yang berarti *Good Governance* Memediasi Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis ini membuktikan bahwa walaupun penerapan prinsip *good governance* dalam sistem pengendalian intern pemerintah telah baik, mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Awalnya variabel sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja instansi pemerintah, dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti *good governance* mampu memediasi hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kinerja instansi pemerintah.

Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* apabila sistem pengendalian intern pemerintah bisa berjalan dengan baik maka akan dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien maka tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Efektif dan efisien disini adalah aktivitas pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat berupa kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber tersedia. Dengan dikeluarkannya PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. .
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa system pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. .
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap *good governance*.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good governance*.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa *good governance* tidak memediasi hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja instansi pemerintah.

7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa *good governance* memediasi hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja instansi pemerintah.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari masing-masing responden sehingga jawaban responden belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Objek penelitian ini dibatasi pada OPD Kabupaten Solok. Hal ini menyebabkan memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian apabila penelitian dilakukan menambah atau mengganti pada objek dan daerah penelitian yang berbeda.

Saran

Pertimbangan yang dapat digunakan untuk memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara yang dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya dengan menggunakan sampel OPD yang ada di beberapa kabupaten atau kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Vivid. 2017. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Pada SKPD Kota Pekanbaru)*, JOM Fekon Vol. 4 No.1 . Universitas Riau. Pekanbaru.
- Arief, dkk. 2015. *Penerapan Good Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh*. ISSN 2302-0164. pp. 57- 70
- Claraini, Chici. 2017. *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Empiris SKPD Rokan Hilir)*, JOM FEKON Vol. 4 No. 1. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hariyati dan Oliviani (2013). *Pengaruh Audit Manajemen Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pt. Jamsostek (Persero) Divisi Regional VI Jawa Timur)*. ISBN: 978-979-636-147-2
- Hidayat, Arif. 2013. *Pengaruh Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD*. Skripsi .Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hidayat, Indra. 2014. *Pengaruh Good Governance, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah*, JOM FEKON Vol. 1 No. 2. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Indriana, Novita. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja SKPD Kab. Kuansing*, JOM Vol.4 No. 2. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Julita, Suci. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja SKPD*, Skripsi. Universitas Negri Padang. Padang.

- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :Andi.
- Revika, Revi. 2014. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Komunikasi Organisasi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Kota Payakumbuh*, JOM Fekon Vol.2 No.1. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Rosmarini, Tri. 2016. *Pengaruh Pengawasan Intern, Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Kab. Rokan Hulu*, JOM Fekon Vol.3 No.1. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Ruspina, DepiOktia. 2013. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance (SKPD Kota Padang)*. Skripsi. Univeristas Negri Padang. Padang.
- Sischa, Sonia EkaPutri. 2016. *Pengaruh Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusi dan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar)*. JOM Fekon Vol. 3 No.1.Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sibagariang, Arisonaldi. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Sarana Pendukung Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Kota Sibolga*. Skripsi. Universitas Negri Padang. Padang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta Bandung
- Syahputra, Tubagus. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintahan Kabupaten Simalungan*, tesis.
- Widiari, Putu Ayu dkk. 2016. *Peran Good Government Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Pemerintah Kota Denpasar*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis 5.8. Universitas Udayana. Denpasar.
- Widyawati, Susanti. 2012. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Dengan Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Mataram)*. Surabaya.
- Yuda, Prima. 2012. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Survey pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)*. Jurnal, Vol.1, No.40. Universitas Siliwangi
- Zalni, Fitri. 2013. *Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Interm Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*, Skripsi. Univeristas Negri Padang. Padang.

www.bpk.go.id

www.kabsolok.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005